

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan taman nasional sebagai kawasan konservasi di Indonesia tidak pernah lepas dari berbagai kendala, diantaranya perambahan, perburuan, konflik satwa dan sebagainya. Berbagai kendala tersebut dapat menghambat efektifitas pengelolaan. Menurut Wulandari (2014), sistem pengelolaan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan. Pengelolaan hanya terfokus pada pengamanan (bersifat pasif dan represif) dengan orientasi kerja hanya berpaku pada project output, kemudian integrasi kebijakan, fungsional, dan sistem yang lemah, dan tidak terdapat sistem informasi yang tetap, serta perencanaan pengelolaan yang tidak berbasis pada kelengkapan, akurasi, dan *times series data*, merupakan fenomena pengelolaan taman nasional yang terlihat saat itu.

Padahal efektifitas pengelolaan kawasan konservasi terkait pada 3 pilar yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan ekosistemnya. Selain itu, peranan staf lapangan menjadi poin perhatian terpenting dalam efektifitas pencapaian tujuan pengelolaan. Semakin sedikitnya staf yang turun ke lapangan. menyebabkan hutan-hutan menjadi semakin tidak terjaga. Terjadi perambahan sedikit demi sedikit, dan kawasan konservasi pun mengalami

kerusakan yang semakin meluas, dan sulit untuk diselesaikan, sehingga data tertulis yang terekam didalam peta pun tidak lagi sama dengan data sesungguhnya di lapangan. Banyak pedoman, arahan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Separuh dari 523 kawasan konservasi (luas 27,23 juta ha atau 6,8 kali luas negeri Belanda) yang telah dicek kondisi tutupan lahannya, diperkirakan seluas 500.000 Ha telah mengalami berbagai tingkat kerusakan (Wiratno, 2011).

Untuk menghindari dan mencegah kerusakan tingkat lanjut serta untuk menjamin efektifitas pencapaian tujuan pengelolaan kawasan konservasi perlu dibagi kedalam unit-unit terkecil pengelolaan (resort) berdasarkan potensi dan permasalahan. Melihat kebutuhan tersebut, pemerintah mulai menerapkan sistem pengelolaan di tingkat lapangan dengan menjadikan resort sebagai ujung tombak pengelolaan. Melalui SK (Surat Keputusan) Dirjen PHKA Nomor S.25/IV-KKBHL/2011 tanggal 11 Juni 2011 (termasuk dalam Rencana Strategis/Renstra Dirjen PHKA 2010-2014), pemerintah berencana meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan taman nasional berbasis resort. Berdasarkan SK tersebut, Pengelolaan taman nasional berbasis resort atau dikenal dengan *Resort Based Management* (RBM) akan diterapkan pada 50 Unit Pelaksana Teknis (UPT) taman nasional yang harus dicapai sampai dengan tahun 2014. Unit-unit pelaksana teknis tersebut memiliki tugas yang diemban berdasarkan Permenhut P.13/Menhut-II/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan. Masing-masing UPT diharapkan dapat melakukan pengelolaan kawasan konservasi guna menjamin

kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di wilayah kerjanya masing-masing.

Program RBM adalah suatu upaya sistematis yang mendorong efektifitas dalam pengelolaan taman nasional. Program RBM itu sendiri bukanlah sebuah tujuan pengelolaan, melainkan hanya sebagai alat (*tool*)/kendaraan sebagai strategi dalam mengelola kawasan konservasi yang efektif. Sistem pengelolaan berbasis resort/RBM bukan merupakan sebuah ikon baru dalam pengelolaan konservasi, sistem tersebut sudah dikenal sejak puluhan tahun yang lalu namun terlupakan dan sekarang mulai ditegaskan kembali. Bentuk pengelolaan RBM tidak hanya terfokus pada pengamanan namun juga pemanfaatan, pengelolaan potensi, dan didasarkan pada data yang didapat di lapangan oleh staf yang selalu berada di lapangan, sehingga pola pengelolaannya menjadi *bottom-up (dari bawah ke atas)*.

Terhitung sampai dengan tahun 2013, menjalankan amanat Renstra Dirjen PHKA 2010-2014, sudah terdapat 44 taman nasional yang menerapkan RBM, termasuk di dalamnya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang mulai menerapkan RBM sejak tahun 2011. Sebelumnya pola-pola kerja lapangan yang serupa dengan RBM di TNBBS, lebih didominasi oleh *Rhino Patrol Unit (RPU)* yang dilakukan oleh WCS (*Wild Conservation Society*) dengan melibatkan staf Balai Besar TNBBS. Mengingat bahwa permasalahan perambah menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga kelestarian TNBBS, sebuah tata kelola (*good governance*) di lembaga Balai Besar TNBBS diperlukan untuk mencapai visi dan misinya. Upaya yang dilakukan TFCA (*Tropical Forest Conservation Act*) yang di gawangi oleh Universitas Lampung (Unila) dan Pusat Informasi

Lingkungan (PILI) *NGO Movement (Non Government Organizaton Movement)* menjadi titik awal yang berusaha menghidupkan kembali sistem berbasis resort (RBM) sebagai sebuah tata kelola (*good governance*) bagi pengelolaan TNBBS.

Penetapan tujuh model resort dari 17 resort yang ada di TNBBS, menjadi langkah awal dalam mengimplementasikan RBM di TNBBS. Resort Biha dan Resort Sukaraja Atas adalah dua dari tujuh resort model yang mendapat pendampingan secara intensif dari tim kerja RBM TFCA Konsorsium Unila-PILI.

Di Resort Sukaraja Atas, RBM lebih ke arah pengembangan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat dibanding dengan perlindungan atau pengamanan. Dikarenakan tingkat perambahan yang kecil, sehingga model pengembangan RBM di Sukaraja Atas lebih ke arah pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan potensi kawasan di Resort Sukaraja Atas, dengan banyaknya kegiatan berbentuk ekowisata akan menekan aktifitas ilegal di dalam kawasan. Di Resort Biha, RBM lebih ke arah pengamanan dan penelitian. Dengan menerapkan strategi bagaimana setiap permasalahan bisa diatasi dan menggali potensi yang belum dikembangkan. Strategi pengelolaan Resort Biha dilakukan mulai dari pembagian tugas personil menurut keahlian masing-masing. Wilayah kerja atau jalur patroli juga dibagi berdasarkan jalur yang dapat diakses dan setiap jalur patroli dianalisis setiap permasalahan dan juga potensinya. Prioritas patroli dengan intensitas yang lebih, dilakukan di titik-titik rawan perambahan dan perburuan. Selain itu juga sudah dibuat program kerja tahunan yang sudah mencakup perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan juga sosial masyarakat.

Resort Sukaraja Atas dan Resort Biha memiliki motivasi dan keinginan yang tinggi dalam penerapan RBM. Oleh sebab itu, peneliti melakukan studi tentang RBM di Resort Sukaraja Atas dan Resort Biha, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terhadap implementasi program RBM, berkaitan dengan pengelolaan kawasan yang efektif.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kegiatan RBM di Resort Sukaraja Atas dan Resort Biha selama ini dalam pengelolaan taman nasional?
2. Bagaimana efektifitas kegiatan RBM yang diterapkan di Resort Sukaraja Atas dan Resort Biha TNBBS?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan *Resort Based Management* (RBM) di Resort Sukaraja Atas dan Resort Biha, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi kegiatan RBM di Resort Sukaraja Atas dan Resort Biha selama ini dalam pengelolaan taman nasional.
2. Mengetahui efektifitas kegiatan RBM yang diterapkan di Resort Sukaraja Atas dan Resort Biha TNBBS.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian Studi Tentang Implementasi Kegiatan RBM di Resort Sukaraja SPTN I Sukaraja dan Biha SPTN II Bengkunt BPTN I Semaka TNBBS, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Untuk mengetahui implementasi pengelolaan ditingkat lapangan berbasis resort (program RBM) sehingga menjadi masukan bagi pengelola resort di Taman Nasional.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), Unit Pelaksana Teknis (UPT) taman nasional, dan pihak terkait dalam penerapan program *Resort Based Management* (RBM) di kawasan taman nasional

E. Kerangka Berpikir

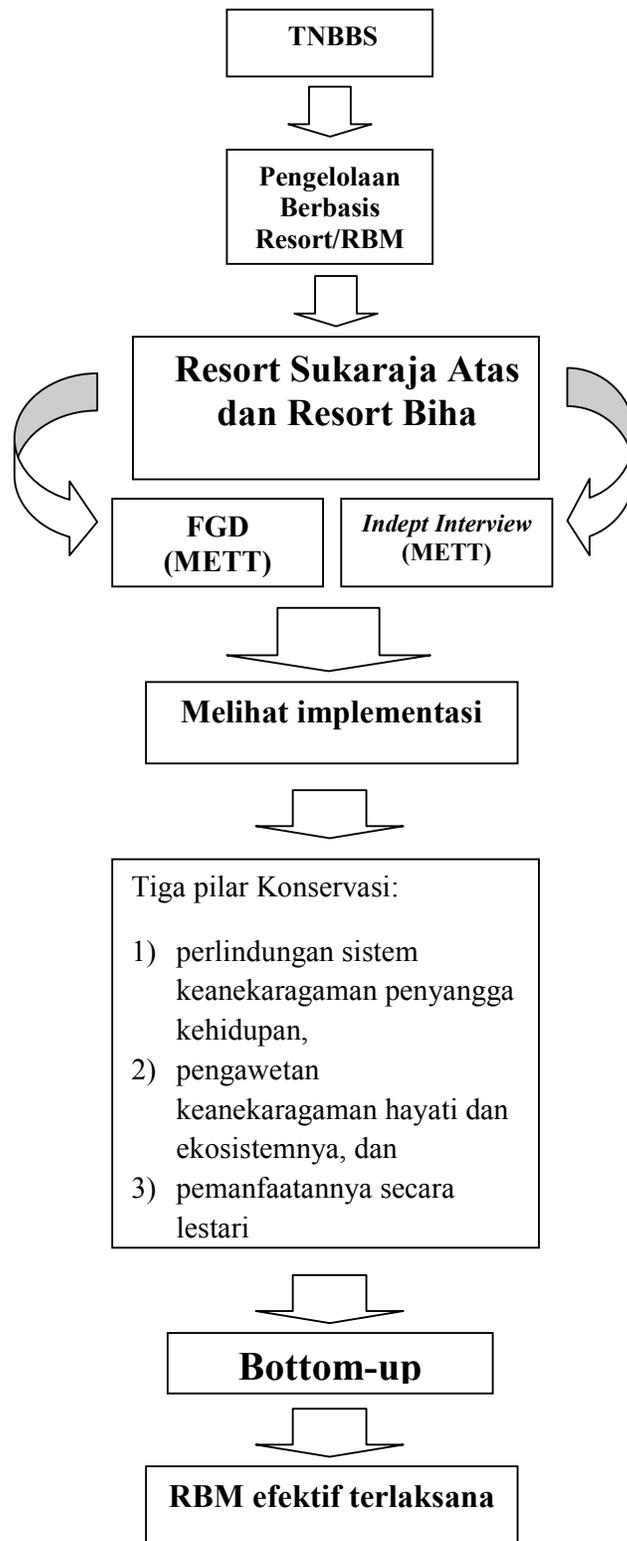
Permasalahan yang dihadapi oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seperti perambahan, perburuan, konflik satwa dan lainnya adalah gambaran yang umum terjadi pada taman nasional di Indonesia. Ditambah dengan belum adanya sistem pengelolaan yang menyentuh ketiga pilar pengelolaan kawasan konservasi, karna selama ini fokus pengelolaan hanya pada pengamanan, serta peranan petugas lapangan yang kurang efisien membuat pengelolaan kawasan taman nasional menjadi kurang efektif. *Resort Based Management* (RBM) hadir sebagai sistem pengelolaan yang mengupayakan peningkatan efektifitas pengelolaan sebuah kawasan lindung dalam hal ini taman

nasional, dengan pengambilan keputusan pengelolaan taman nasional (tingkat tingkat resort, seksi, bidang dan balai besar) yang didasarkan pada data dan informasi lapangan yang dikumpulkan oleh petugas resort yang kompilasi dan dipadukan dalam sistem *baseline* informasi.

Program RBM di TNBBS mulai diterapkan sejak tahun 2011 sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Dirjen PHKA Nomor S.25/IV-KKBHL/2011 tanggal 11 Juni 2011. Dasar program RBM adalah pengelolaan kawasan berdasarkan wilayah kerja yang dibagi kedalam beberapa resort, sehingga mempermudah kegiatan pengelolaan maupun pengawasan kawasan. Dikarenakan TNBBS telah terbagi kedalam 17 resort, sebagai permulaan ditentukanlah tujuh resort model dari 17 resort tersebut untuk menerapkan program RBM. Ketujuh resort tersebut adalah Resort Way Nipah, Resort Sukaraja Atas, Resort Biha, Resort Pugung Tampak, Resort Balik Bukit, Resort Pugung Tampak, dan Resort Merpas. Penelitian ini ditujukan untuk melihat implementasi dan efektifitas RBM di dua resort model yang mendapatkan pendampingan intensif tim kerja RBM TFCA Konsorsium Unila-PILI, yaitu Resort Biha (SPTN II) dan Resort Sukaraja Atas (SPTN I) Bengkunt BPTN I Semaka TNBBS.

Untuk mencapai tujuan tersebut, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan diskusi kelompok terarah/*Focus Group Discussion* (FGD) dengan menggunakan metode *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) dalam bentuk kuesioner, metode ini melakukan penilaian cepat untuk mengidentifikasi pengelolaan yang terdiri dari enam aspek, meliputi *context*, *planning*, *inputs*, *process*, *outputs*, dan *outcomes*. Penggunaan kuesioner METT juga dijadikan

panduan dalam wawancara mendalam/*Indepth Interview*. Hasil wawancara mendalam digunakan untuk melengkapi hasil FGD/kuesioner. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk melihat implementasinya. Tahapan implementasi RBM ditujukan untuk melihat pengelolaan yang dilakukan melalui tiga pilar konservasi yaitu perlindungan sistem keanekaragaman penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dan pemanfaatannya secara lestari. Efektifitasnya dilihat dari mekanisme unit *database* yang terjaln.



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir